

PERANAN FORUM KESERASIAN SOSIAL DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DI AMBON

THE ROLE OF THE SOCIAL HARMONY FORUM TO OVERCOME SOCIAL CONFLICT IN AMBON

Andayani Listyawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta

Email: andayani307@yahoo.com

Diterima : 16 Juli 2018; Direvisi: 4 Februari 2019; Disetujui: 1 Maret 2019

Abstrak

Penelitian tentang peranan forum keserasian sosial dalam mereduksi konflik sosial di masyarakat bertujuan mengetahui eksistensi forum keserasian sosial yang melalui program kerjanya mampu meredakan konflik dan mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik yang dilaksanakan di Ambon. Upaya mewujudkan harmonisasi sosial merupakan alasan dilaksanakan penelitian dalam mencegah sedini mungkin potensi konflik sosial, mengingat akibat yang ditimbulkan menyebabkan hubungan sosial antar warga setempat menjadi disharmoni. Metode yang digunakan, yakni kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara terstruktur didukung pengamatan dan telaah dokumen. Responden penelitian ini adalah pengurus forum, pendamping forum, tokoh masyarakat dan aparat dinas terkait. Analisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian bahwa kegiatan forum keserasian sosial yang dibentuk dengan program kerjanya melaksanakan kegiatan perbaikan lonceng gereja dan pembuatan jalan setapak berdampak pada kondisi masyarakat setempat menjadi relative kondusif walaupun belum secara maksimal. Kondisi demikian dapat berlangsung karena ada kearifan lokal antara lain nilai lokal, peran ketokohan, tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pendayagunaan kearifan lokal dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait sebagai sumber potensi bagi penguatan kohesivitas sosial dalam mendukung keberhasilan program keserasian sosial.

Kata Kunci: *forum keserasian sosial, konflik sosial, kearifan lokal.*

Abstract

Research on the role of social harmony forums as an effort to reduce social conflict in the community aims to find out the existence of a social harmony forum that through its work program is able to reduce conflict and find out the factual conditions of conflict-prone areas carried out in Ambon City, Maluku. Efforts to realize social harmonization are the reason for conducting research in preventing as early as possible the potential for social conflict, given the consequences caused social relations between local residents to be disharmony. The method used, namely with a quantitative, data collection with questionnaires and structured interviews supported by observation and review of documents. Respondents consisted of forum administrators, forum assistants, community leaders and related government officials. Quantitative descriptive analysis. The results of the study conclude, through the variables of communication, resources, commitment, and implementing structure, that the social harmony forum activities formed with the work program to carry out church bells repair activities and the construction of footpaths have impacted the local community even though they have not been maximally conducive. Such conditions can take place because there is support for the existence of local wisdom such as local values, role of personhood, traditions and values of community togetherness. Therefore, in the future it is necessary to utilize local wisdom and establish partnerships with related parties as a potential source for strengthening social cohesiveness in supporting the success of social harmony programs. In the future, a program to strengthen social harmony can reach other areas that are more likely to conflict.

Keywords: *social harmony forum, social conflict; local wisdom.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pluralis, artinya masyarakatnya mempertahankan kondisi kemajemukan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat. Keragaman tersebut merupakan potensi bangsa yang sangat handal apabila dikelola dengan tepat dalam rangka mewujudkan perdamaian, persaudaraan dan kebersamaan. Hakikatnya dalam kehidupan kemasyarakatan akan tercermin sikap dan perilaku, seperti rukun, *tepa saliro* (saling menghargai), akrab, saling menghormati, kesatuan dan keseimbangan, tanggungjawab, saling ketergantungan, tidak terjadi dominasi eksploitasi, pertukaran yang saling menguntungkan, saling pengertian serta adanya kesamaan pandangan. Hal ini senantiasa ditumbuhkembangkan dan dilestarikan agar tercapai keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila kondisi tersebut terwujud maka akan terjadi keserasian sosial di lingkungan masyarakat dan pemicu terjadinya konflik dapat dicegah. Konflik adalah proses social yang timbul karena adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat.

Berkait dengan konflik di kehidupan social kemasyarakatan, konflik sosial pada dasarnya suatu proses sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik sosial terjadi akibat perselisihan atau pertikaian di lingkungan masyarakat yang dilatarbelakangi berbagai permasalahan dapat bernuansa perselisihan antar suku bangsa atau ras, kesenjangan sosial, persengketaan secara geografis berupa lahan pemukiman atau fasilitas umum, disamping berkaitan dengan isu masalah keagamaan. Sementara konflik politik merupakan isu yang dipertentangkan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Konflik terjadi dapat disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara komunitas masyarakat (Bakri, 2015). Lebih lanjut Seta Basri mengungkapkan, bahwa konflik yang terjadi di Indonesia berkembang di sekeliling garis multikulturalitas masyarakat (Sukardi, 2016). Hal ini dimaksudkan, bahwa adanya keragaman berbagai macam budaya dalam kehidupan masyarakat dapat memicu pertentangan yang dapat menimbulkan konflik. Hal ini senada seperti yang diungkap Parekh (1997) yang dikutip Azra (2007), bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Pada hakikatnya konflik cenderung berkonotasi negatif, namun apabila konflik dikelola secara baik niscaya mampu menjadi kekuatan dan perubahan positif. Machiavelli dan Hobbes (dalam Koswara, et.al:2005) mengungkapkan, bahwa karakter dasar manusia secara kontinyu menciptakan kondisi konflik karena tiap individu memiliki kepentingan pribadi masing-masing. Sejalan hal tersebut Khofifah Indar Parawansa (saat itu sebagai Menteri Sosial) menyebut, meningkatnya potensi konflik sosial belakangan ini sebagai salah satu dampak dari kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia (kbnnews.id, 2017)

Beberapa kasus konflik sosial yang teridentifikasi antara tahun 2013 hingga 2014 dapat disimak pada tabel 1.

Sementara tahun 2015 juga terjadi kasus sengketa lahan yang mengakibatkan pembunuhan terhadap Salim Kancil. Dari berbagai sumber juga terdata, Konsorsium Pembaharuan Agraria mengidentifikasi tahun 2016 terjadi konflik berkaitan agraria sebanyak 450 kasus. Kompas mendata sepanjang tahun

Tabel 1. Peristiwa Konflik Sosial Tahun 2013-2014

Tahun	Peristiwa Konflik Sosial	Jumlah
2013	◦ Bentrok antar warga	37 kasus
	◦ Isu keamanan	16 kasus
	◦ Isu sara	9 kasus
	◦ Kesenjangan sosial	2 kasus
	◦ Konflik pada institusi pendidikan	2 kasus
	◦ Konflik ormas	6 kasus
	◦ Sengketa lahan	11 kasus
	◦ Ekses politik	kasus
	Jumlah	92 kasus
2014	◦ Bentrok antar warga	40 kasus
	◦ Isu keamanan	20 kasus
	◦ Isu SARA	1 kasus
	◦ Konflik ormas	1 kasus
	◦ Sengketa lahan	6 kasus
	◦ Ekses politik	kasus
		Jumlah

Sumber: Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, 2016.

2015 hingga 2016 telah terjadi konflik SARA sebanyak 1.568 kasus. Berkait dengan konflik SARA yang cukup banyak tersebut dampak yang ditimbulkan yakni banyak menelan korban baik jiwa maupun materi.

Menyimak ilustrasi dari kejadian beberapa kejadian konflik yang merupakan konflik sosial, alangkah baiknya ada kelembagaan sosial yang menjadi tempat pihak berkonflik untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui negosiasi dan dialog (Susan, 2012). Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kondisi keamanan warganya tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penanggulangan konflik, baik sejak dari pencegahan, penghentian maupun pemulihan pasca konflik yang dituangkan dalam UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam rangka menyelesaikan konflik melalui penguatan lembaga pengendalian sosial supaya tercipta keadilan di lingkungan masyarakat. Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam rangka perlindungan sosial

bagi masyarakat telah mengucurkan program keserasian sosial bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Hakikatnya untuk memulihkan, memelihara, memantapkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Secara legalitas melalui Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Bantuan Sosial Nomor: 09/SK/BS.04.I/2012 sebagai turunan dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) supaya potensi konflik yang ada di masyarakat tidak menjadi konflik terbuka. Melalui pendekatan *community based social disaster risk management* diharapkan dapat mewujudkan keserasian sosial (Petunjuk Teknis Keserasian Sosial, 2016).

Melalui program keserasian sosial diberikan bantuan stimulan sebesar Rp 109 juta yang ditujukan untuk kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka penanganan konflik, besaran bantuan dana dirasakan terbatas untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya besaran dinaikkan menjadi Rp 146 juta. Diharapkan dengan naiknya besaran program bantuan dapat memperbaiki, menyempurnakan bahkan mengoptimalkan program sehingga akan terjalin kekompakan, keakraban, harmonisasi, dan kohesivitas tumbuh berkembang lebih baik. Hal ini dikuatkan dari hasil kajian Tim B2P3KS (2017), bahwa bantuan penguatan keserasian sosial tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik dan kegiatan forum lainnya sehingga diperlukan tambahan dana dengan harapan program yang dicanangkan dapat memenuhi target yang diharapkan. Sejauh ini melalui keberadaan forum keserasian sosial, berefek situasi masyarakat di daerah rawan konflik relatif

lebih kondusif karena berbagai permasalahan dapat ditangani melalui pendekatan forum keserasian sosial dan unsur kearifan lokal (nilai, tradisi, ketokohan) sebagai alternatif pengembangan program keserasian sosial. Kajian empirik eksistensi forum keserasian sosial di lokasi penelitian memperlihatkan, bahwa melalui program forum keserasian sosial dapat meminimalisir dan atau mencegah terjadinya konflik sosial di daerah rawan konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya forum keserasian sosial sangat dibutuhkan masyarakat untuk meredam konflik, tidak hanya dalam segi keamanan tetapi tersirat ada pendekatan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa untuk saling toleransi menghormati perbedaan. Dana penguatan dialokasikan sebagai stimulan digunakan sebagai upaya meredam konflik. Hal ini merupakan alasan mendasar untuk mengetahui seberapa jauh keberadaan program forum keserasian sosial mampu meredam konflik sosial di lokasi rawan konflik.

Program keserasian sosial yang dilaksanakan forum pada kenyataannya bermanfaat dalam meredam terjadinya konflik karena program berdasar kebutuhan dan aspirasi masyarakat, walaupun hasil akhir yang dicapai relative belum optimal. Terlebih dapat menciptakan tatanan kehidupan sosial yang serasi dilandasi nilai dasar keberagaman, toleransi, saling menghargai dan menghormati sehingga dapat membangun, memantapkan, mengembangkan dan memelihara kembali kehidupan bersama di antara masyarakat dalam persaudaraan sejati. Setidaknya program mampu menjembatani kebutuhan masyarakat sehingga potensi yang menimbulkan konflik dapat diminimalisir. Berpijak dari urgennya eksistensi forum dalam meredam konflik sosial selanjutnya dilakukan penelitian. Hal ini berdasarkan kondisi empirik menunjukkan, bahwa dana penguatan untuk pembangunan fisik dapat

digunakan sebagaimana peruntukannya. Di Kota Ambon menunjukkan, bahwa kegiatan forum keserasian sosial relatif mampu meredam konflik sosial masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik dan mengetahui eksistensi forum keserasian sosial dalam meredam konflik. Manfaat yang diperoleh penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu kesejahteraan sosial khususnya dalam upaya penguatan sosial masyarakat rawan konflik. Secara praktis, diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, selaku penanggungjawab langsung program keserasian sosial dalam memberi perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat di daerah rawan konflik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilakukan untuk mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik dan menggambarkan eksistensi forum keserasian sosial dalam upaya meredam konflik sosial di daerah rawan konflik. Metode yang digunakan secara gabungan (*mix methods*) yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode gabungan untuk mencoba menelaah secara mendalam kegiatan forum keserasian sosial dalam rangka meredam konflik sosial di masyarakat setempat.

Fokus penelitian untuk mengetahui kondisi daerah konflik dan peranan forum keserasian sosial dalam upaya meredam konflik sosial yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumberdaya, komitmen dan struktur. Lokasi pengumpulan data di Kota Ambon, Provinsi Maluku dengan pertimbangan tempat tersebut merupakan salah satu daerah rawan konflik sosial di Indonesia.

Sumber data dipilih dari sejumlah orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberi informasi berkaitan fenomena yang diteliti agar data yang diperoleh handal, meliputi tokoh masyarakat/masyarakat, pengurus forum keserasian sosial, aparat dinas sosial setempat keseluruhan sejumlah 30 orang.

Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Wawancara mendalam menggunakan panduan, dan *FGD* (*Focus Group Discussion*) untuk *meng-crosscek* data lapangan yang dihadiri pengurus forum, pekerja sosial, pendamping forum dan dinas terkait pengelolaan bencana sosial. Sementara pengumpulan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, berupa buku, surat kabar dan berbagai sumber dokumen yang terkait dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilaksanakan analisis yang sebelumnya telah dibedakan berdasarkan jenisnya.

Analisis data kuantitatif menggunakan perhitungan dengan persentase sumbangan efektif untuk mengungkap sumbangan seluruh atau setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. yang terlihat dari nilai koefisien determinan regresi (R^2), seperti diungkap Hasan, 1993. Variabel yang dimaksud meliputi komunikasi, sumberdaya, komitmen, dan struktur. Sementara data kualitatif dianalisis melalui tahapan pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data, dan penafsiran data. Analisis dimulai dengan proses menelaah data dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan reduksi dengan membuat abstraksi. Tahap berikutnya adalah penyusunan data dalam satuan-satuan dengan membuat koding, mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan dan penafsiran data serta pemaknaan data dari hasil wawancara dan pengamatan yang diperoleh (Moleong, 2010). Pentahapan ini sejalan seperti yang diungkap Miles dan

Huberman (Sugiyono, 2006), data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilaksanakan reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas sebagai bahan penarikan kesimpulan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas sebagai bahan penarikan kesimpulan yang terus direvifikasi sampai diperoleh konklusi yang kokoh (Agus Salim, 2000).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi

Kementerian Sosial mencatat sekurangnya ada 143 daerah rawan konflik di Indonesia, salah satunya adalah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Masyarakat daerah ini relative sering terjadi pertikaian disebabkan intoleransi hingga berakibat bentrok dengan pemicu bermacam-macam, misalnya pertikaian antar warga, perkelahian, ataupun perebutan lahan tanah yang akhirnya menjurus pada SARA. Peristiwa konflik sering terjadi di tempat tersebut yang pada akhirnya Ambon identik sebagai salah satu daerah rawan konflik sosial sebagai imbasnya. Sebagaimana diketahui, konflik menimbulkan korban baik fisik, psikis maupun material. Hakikatnya konflik merupakan situasi yang ada disetiap masyarakat dan tidak satu masyarakatpun yang tidak pernah mengalaminya. Suatu daerah dikatakan rawan konflik menurut Tryatmoko, dkk dipicu kesenjangan ekonomi (kemiskinan), social (pendidikan dan kesejahteraan), keragaman budaya (agama dan etnis), politik (kelompok elit, kebijakan, dan birokrasi), dan kondisi geografis (kepadatan penduduk) (2011).

Secara geografis tata letak Kota Ambon dikelilingi oleh pegunungan dan laut. Kondisi ini tentunya merupakan lokasi rawan

bencana alam. Berdasarkan aspek demografi masyarakat Kota Ambon bersifat heterogen terdiri penduduk asli dan pendatang. Hal ini berkait, lokasi merupakan kota pelabuhan dan pariwisata sebagai konsekuensinya banyak orang lalu lalang baik menetap maupun sebatas singgah, kondisi ini mewarnai geliat kehidupan masyarakat. Keheterogenan penduduk diasumsikan salah satu aspeknya dapat memicu terjadi konflik sosial karena berlatarbelakang sosial budaya bervariasi. Penduduk Ambon berjumlah 395.423 jiwa terdiri laki-laki sejumlah 197.529 jiwa dan perempuan sejumlah 197.894 jiwa dengan perbandingan sex ratio 99.82 (BPS, 2015).

Sebagaimana diketahui, ada beberapa suku bangsa yang mendiami Kota Ambon, antara lain suku bangsa Ambon, Kei, Tionghoa, Minangkabau, Papua, Melayu, Jawa, Minahasa, Sunda, Timor. Oleh karena itu, tampak jelas adanya kemajemukan masyarakat yang berdomisili di Ambon. Keheterogenan suku bangsa yang mewarnai masyarakat Ambon hakikatnya merupakan modal dasar pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Realitas di lapangan memperlihatkan, banyaknya suku bangsa salah satunya juga dapat menjadi pemicu timbulnya konflik sosial di masyarakat, hal ini ditengarai tidak ada atau belum terbangunnya ketahanan sosial di masyarakat. Ketahanan sosial masyarakat diharapkan mampu untuk meminimalisir dan atau mencegah pemicu timbulnya konflik sosial supaya lingkungan menjadi kondusif.

Potensi dan Dampak Konflik

Kota Ambon, Provinsi Maluku sudah tidak asing dengan sebutan daerah konflik. Peristiwa yang terjadi berkait dengan permasalahan konflik senantiasa menghiasi berbagai berita di media, baik cetak maupun elektronik. Tahun

1999 merupakan titik awal terjadinya peristiwa konflik besar yang sempat menggemparkan karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya warga setempat. Sebagaimana diketahui, bahwa konflik yang terjadi di tempat tersebut terjadi karena terjadi pertentangan kepentingan dari dua kelompok yang berbeda. Kondisi tersebut seperti yang telah ditegaskan oleh Bakri (2015) pada ulasan di atas, bahwa perbedaan kepentingan dapat menyebabkan pertentangan dan akhirnya terjadi konflik.

Akibat peristiwa tersebut menyebabkan jatuhnya korban, baik korban jiwa, harta benda, maupun fasilitas umum. Runutan wawancara dari sumber data terungkap, bahwa konflik terjadi bermula oleh perebutan lahan yang pada akhirnya melebar menjadi permasalahan kriminal, seperti perkelahian, minuman keras (miras) bahkan perselisihan disebabkan kesalahpahaman yang umumnya bermotif SARA. Berbagai peristiwa tersebut berdampak pada fasilitas umum yang diklaim milik golongan tertentu, seperti pasar untuk kaum muslim dan pasar khusus non muslim. Situasi kurang kondusif ini berlangsung cukup lama, dan saat ini pertikaian kedua belah pihak berangsur kembali normal. Situasi semakin kondusif ini disebabkan campur tangan berbagai pihak terutama tokoh adat, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat yang relatif mampu meredam konflik berkepanjangan tersebut. Sedikit mengungkap peristiwa sekitar dua bulan lalu yang mana terjadi perselisihan antara kelompok remaja/geng hingga menyebabkan perkelahian dan pertikaian yang akhirnya menyebabkan bentrok antar kedua belah pihak. Pemicu peristiwa disinyalir berupa pengaruh minuman keras (miras), seperti ditegaskan Kepala Desa Hunuth

“Sekitar dua minggu yang lalu telah terjadi perkelahian yang pelakunya rata-rata

berusia muda. Pemicunya ada sekelompok pemuda yang minum-minuman keras, karena pengaruh alkohol sehingga membuat mereka kehilangan kendali dengan membuat kegaduhan daerah setempat. Masyarakat yang tidak terima perlakuan tersebut pada akhirnya melawan yang berakibat terjadi bentrok, hingga beberapa hari suasana masih mencekam dan aparat keamanan masih siaga.”

Sementara di Dusun Amaory, Kecamatan Passo terjadi konflik sosial yang menyebabkan seluruh penduduknya direlokasi. Konflik ini disinyalir disebabkan dan dipengaruhi SARA, akibatnya menimbulkan korban baik jiwa maupun harta benda. Pemerintah tidak tinggal diam dan memberi bantuan berupa lahan pemukiman baru yang didukung *support* dana untuk membangun pemukiman baru senilai Rp 12 juta/unit dengan ukuran 4x5 meter sedangkan yang menerima relokasi sebanyak 340 KK dengan luas tanah untuk lahan relokasi sebanyak 13 hektar.

Hasil identifikasi FGD dan didukung data dari dokumentasi menyebutkan, bahwa setelah terjadi konflik pada tahun 1999 beberapa kali terjadi konflik kembali. Rekapitulasi selama lima tahun terakhir mulai tahun 2012 hingga 2017 telah terjadi beberapa kasus konflik sosial yang teridentifikasi seperti dapat disimak pada tabel 2 sebagai berikut.

Serangkaian konflik yang terjadi setelah diidentifikasi selama kurun waktu berurutan seperti diperlihatkan pada tabel 2 tentang rekapitulasi peristiwa konflik sosial, memperlihatkan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat rawan terjadi konflik sosial. Pemicu peristiwa berawal dari sebatas perselisihan warga yang selanjutnya melebar menjadi konflik sosial. Dampak konflik berkepanjangan dapat menyebabkan dampak

Tabel 2. Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial di Ambon pada Tahun 2012-2017

No	Tahun	Tempat	Uraian peristiwa	Dampak
1	2012	Desa Pelaw	Konflik sosial.	402 unit rumah terbakar
2	2013	Desa Kolser	Konflik sosial	3 orang meninggal.
3	2014	Desa Parto dan Desa Harin	Konflik sosial.	29 unit rumah terbakar.
4	2015	Desa Negeri Lima Desa Seith.	Konflik sosial	25 unit rumah terbakar.
5	2016	Kalurahan Hunipopu	Konflik sosial	105 unit rumah terbakar.
6	2017	Kalurahan Silak	Konflik sosial.	45 unit rumah terbakar.
		Desa Iha dan Desa Lulu	Konflik sosial	24 unit rumah terbakar.

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2017.

besar pada masyarakat, yaitu berupa korban jiwa dan harta benda.

Peranan Forum Kereserian Sosial

Berpijak dari berbagai peristiwa konflik sosial yang terjadi, salah satu upaya untuk menangani adalah melalui kelompok masyarakat di lapisan akar rumput dalam bentuk forum keserasian sosial. Kereserian sosial dimaksud diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan sosial yang harmonis antar warga supaya terpelihara perdamaian berkelanjutan di lingkungan masyarakat setempat. Nilai yang terkandung dalam keserasian sosial sebagaimana telah ditandaskan, yaitu mengandalkan kekuatan lokal, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya lokal, memperkuat kepemimpinan lokal, memperkuat kepranataan lokal sebagai wadah pertukaran komunikasi, informasi, edukasi, dan persuasi antar warga yang berbeda sekaligus sebagai agen keserasian sosial di

tingkat hulu, mengoptimalkan proses dan mekanisme lokal, mengandalkan keterampilan lokal sebagai teknologi pencegahan konflik sosial (Departemen Sosial, 2016). Forum keserasian sosial dibentuk ditujukan untuk meminimalisir ataupun mencegah terjadinya konflik supaya terjadi kehidupan damai dengan terbangunnya saling percaya, komunikasi yang santun dan kohesivitas sosial antar warga. Oleh karena itu inti program keserasian sosial adalah membangun, memantapkan, dan mengembangkan serta memelihara kehidupan bersama (*livehood*), di antara masyarakat di lokasi tempat tinggal, persaudaraan sejati (*brother hood*), kebersamaan (*together mess*), rasa senasib sepenanggungan, dan solidaritas sosial (kohesivitas, kesetiakawanan, dan solidaritas).

Sejauh ini keberadaan forum keserasian sosial setempat mampu meredam potensi konflik berkait dengan isu bernuansa keagamaan, suku bangsa atau ekonomi. Berkait keagamaan melalui perbaikan lonceng gereja. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tidak hanya warga berkeyakinan tertentu, tetapi warga yang mempunyai keyakinan berbeda juga terlibat. Pembangunan jalan setapak dan pengadaan air bersih sebagai upaya meminimalisir pertikaian antar suku bangsa yang juga tersirat masalah bidang ekonomi. Hasil pembangunan jalan setapak mampu mempermudah akses masyarakat di lingkungan tersebut, sedangkan pengadaan air bersih yang dialirkan melalui tendon air mampu menekan perebutan pengadaan air dan menghemat pengeluaran keluarga.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan forum keserasian sosial mendapat bantuan penguatan sebanyak Rp 109 juta sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Keserasian Sosial (2016) dialokasikan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Pekerjaan fisik sebanyak Rp 97.000.000, pembangunan tugu sebanyak Rp 5.000.000,-, kegiatan non fisik sebanyak Rp 2.000.000,- dan kegiatan operasional dialokasikan sebanyak Rp 5.000.000,-. Pada kenyataannya melalui pendalaman dengan pengurus forum dan dokumen yang ada memperlihatkan, bahwa bantuan dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk membangun sarana fisik yang disepakati berupa balai pertemuan selanjutnya dilakukan tambahan dana secara swadaya dari masyarakat setempat dan terkumpul sejumlah Rp 15.050.000,-. Pembangunan balai pertemuan merupakan kesepakatan warga yang peruntukannya sebagai sarana musyawarah untuk membahas berbagai permasalahan sosial. Pembangunan balai upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat terlibat kegiatan kemasyarakatan dengan tidak membedakan status sosial ekonomi, latar belakang keluarga atau pendidikan diharapkan mereka bekerjasama supaya tercipta kohesivitas sehingga meminimalisir pertentangan.

Sejalan dengan eksistensi forum keserasian sosial dalam upaya menangani konflik sosial masyarakat di lokasi penelitian yang dilihat dari keefektifan. Menggunakan penghitungan analisis yang mengacu pada Edward III berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, komitmen dan pelaksana. Keempat aspek ini diasumsikan mampu memberikan sumbangan efektif terhadap forum keserasian sosial dalam menangani konflik sosial di Kota Ambon. Berdasar penghitungan analisis secara kuantitatif terhadap efektivitas keberadaan forum keserasian sosial dilakukan dengan menggali data sebanyak 30 orang sebagai responden. Menggunakan metode penghitungan sumbangan efektif atau kontribusi efektif pada variabel komunikasi diperoleh nilai sebesar 16,10. Melalui nilai $b = .299$, artinya tingkat komunikasi dapat mempengaruhi terhadap

tingkat keberhasilan pelaksanaan program forum yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan sejatinya komunikasi dilakukan secara baik pada tataran pengelola forum. Pengelola forum melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara dari sisi Pendamping mereka melaksanakan tugas pendampingan sejak sebelum, saat pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, mendampingi, menggerakkan potensi kesejahteraan sosial, menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah, memonitor hingga menyusun laporan. Hal ini relatif belum dilaksanakan secara maksimal walaupun seorang pendamping telah menerima pembekalan. Disatu sisi keberadaan forum diarahkan untuk memberi pencerahan, kemanfaatan, dan aksesibilitas terhadap masyarakat.

Sejauh ini berdasar penghitungan melalui sumbangan atau kontribusi efektif dari variabel aspek sumberdaya dengan nilai $b = -0,071$ menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,361, artinya tingkat sumber daya yang dimiliki forum memberi hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan forum. Berdasar penghitungan sumbangan efektif menyatakan bahwa tingkat sumberdaya diikuti dengan kenaikan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa tingkat sumberdaya terbukti mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan kegiatan forum.

Kondisi tersebut berkaitan dengan nilai koefisien terstandart melalui uji regresi menunjukkan angka $-0,071$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,722 dimana $> \alpha = 0,05$, mengandung arti bahwa tingkat sumberdaya memberikan sumbangan terhadap keberhasilan kegiatan. Kajian empirik di lapangan menunjukkan yang dimaksud sumber daya tidak

semata-mata ditinjau dari tingkat pendidikan pelaksana tetapi dipengaruhi juga dari faktor lain, melalui runutan wawancara menunjukkan, antara lain yang dimaksud faktor lain, yaitu ditengarai belum adanya dukungan maksimal dari pemerintah daerah terhadap dukungan dana melalui dana APBD. Sementara itu juga ditengarai belum adanya partisipasi dunia usaha dan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung terhadap urgennya keberadaan program forum keserasian sosial.

Komitmen juga dipergunakan untuk mengukur tingkat efektivitas forum keserasian sosial dalam mencegah konflik sosial. Berdasar perhitungan menggunakan analisis korelasi pada aspek komitmen menunjukkan angka 0,523. Hasil ini memperlihatkan hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan forum yang didukung oleh kepedulian dari berbagai elemen, seperti pengurus forum, pendamping dan atau fasilitator dalam mengelola kegiatan forum. Perhitungan persentase sumbangan efektif tingkat komitmen atas keberhasilan pelaksanaan forum sebesar 9,57 persen. Kondisi ini terkait dengan nilai koefisien terstandart pada hasil uji regresi yang menunjukkan angka 0,183 dengan nilai signifikansi 0,489 dimana $> \alpha = 0,05$, artinya bahwa tingkat komitmen memberikan sumbangan terhadap keberhasilan kegiatan forum walaupun nilainya tidak signifikan. Berdasarkan penghitungan tersebut menunjukkan bahwasanya nilai tinggi ternyata tidak dapat memberikan sumbangan efektif besar terhadap keseluruhan keberhasilan kegiatan forum. Untuk memperbaiki kondisi tersebut diharapkan ada dukungan dari pemerintah setempat, antara lain dalam bentuk Peraturan daerah (Perda)

Ditinjau dari aspek pelaksana, analisis korelasinya menunjukkan antara tingkat struktur pelaksana dengan tingkat keberhasilan kegiatan program menunjukkan angka 0,616.

Kondisi ini menunjukkan hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan kegiatan program. Ketepatan penempatan struktur pelaksana terbukti mempengaruhi tercapainya keberhasilan kegiatan program keserasian sosial yang telah ditetapkan. Perhitungan sumbangan efektif tingkat struktur pelaksana terhadap tingkat keberhasilan program keserasian sosial menunjukkan sebesar 19,59 persen, artinya meskipun tingkat struktur pelaksana terbukti mempengaruhi tingkat keberhasilan program, namun sumbangan efektifnya terhadap keberhasilan program secara keseluruhan tidak sebanyak variabel lain. Hal ini terkait dengan nilai koefisien terstandart hasil uji regresi sebanyak 0,318 dengan nilai signifikansi 0,299 dimana $\alpha = 0,05$, artinya bahwa tingkat struktur pelaksana memberikan sumbangan bagi keberhasilan forum walaupun nilainya tidak signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan walaupun tingkat struktur pelaksana menunjukkan nilai tinggi ternyata tidak selalu dapat memberikan sumbangan efektif yang besar terhadap keberhasilan program keserasian sosial, diasumsikan ada variabel lain yang berpengaruh. Hasil empirik menunjukkan kelengkapan dan ketepatan struktur pelaksana dari forum yang didukung perencanaan dan komitmen pelaksana akan mampu mendukung keberhasilan program forum.

Sejalan dengan hal tersebut, mengacu teori Edward III memperlihatkan bahwa eksistensi forum keserasian sosial dalam menangani konflik sosial di Kota Ambon menurut perhitungan sumbangan efektif total yang merupakan nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai 42,7 persen. Nilai ini merupakan nilai sumbangan efektif total yang merupakan nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan keterbatasan variabel independen dari komunikasi, sumber daya, komitmen, dan struktur pelaksana.

Berikut disampaikan hasil perhitungan sumbangan efektif variabel komunikasi, sumberdaya, komitmen dan struktur seperti yang telah disampaikan pada uraian di atas.

Tabel 3: Perhitungan Sumbangan Efektif

Variabel Implementasi	b	Koefisien Korelasi	Sumbangan Efektif Per Variabel	Sumbangan Efektif Total (R^2)
Komunikasi	,299	0,538	16,10418	42,65933
Sumberdaya	-,071	0,361	-2,57394	
Komitmen	,183	0,523	9,544803	
Struktur	,318	0,616	19,58429	

Sumber: Data primer, 2018

Hasil perhitungan sumbangan efektif dari keempat variabel menunjukkan angka 42,7 persen. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa eksistensi forum keserasian sosial dalam menangani konflik di Kota Ambon melalui program yang dicanangkan dinilai berhasil walaupun tidak serta merta secara maksimal karena dipengaruhi faktor lain yang ikut berpengaruh dan tidak diukur secara statistik. Berdasarkan diskusi terfokus ditemukan kemungkinan faktor lain tersebut berupa *kearifan lokal*. *Kearifan lokal* yang dimaksud berupa nilai kemasyarakatan dan ketokohan baik tokoh adat, masyarakat maupun tokoh agama serta budaya lokal juga ditengarai mampu menyumbang dalam mendukung meminimalisir bahkan mencegah konflik. Hal tersebut diperkuat oleh Ode (2015) yang mengemukakan tentang keberadaan budaya lokal yang dapat digunakan mengendalikan terjadinya konflik sosial dalam tulisannya yang berjudul *Budaya Lokal sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku*. Sebagaimana nilai kemasyarakatan berupa semboyan *Orang Basudara-Ale rasa Beta rasa* (artinya kurang lebih orang bersaudara merupakan satu hati satu jantung) sangat

dominan dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat di Kota Ambon. Suasana kondusif tersebut mempengaruhi terhadap timbulnya potensi konflik sosial.

Hasil penelusuran dari wawancara kepada masyarakat terungkap bahwa adanya forum keserasian sosial melalui programnya merasa kemanfaatannya dan menyatakan cukup terbantu. Melalui program keserasian social dapat terwujud jalan setapak, penyediaan air bersih, perbaikan lonceng gereja atau balai pertemuan. Sementara pihak aparat pemerintah dan masyarakat saling mendukung untuk bekerja sama dalam upaya meredakan potensi konflik melalui dukungan kearifan lokal, komunikasi yang santun, dan kepercayaan serta yang terpenting adalah membentuk suatu program membangun masyarakat disebut *Pella Gandong*. Sementara ditinjau dari aspek bantuan penguatan yang diterima sebesar Rp 109 juta dimanfaatkan untuk pembangunan balai pertemuan dan tugu keserasian social bahkan ditambah swadaya dari masyarakat untuk menyempurnakan pembangunan tersebut. Balai pertemuan diperuntukkan sebagai tempat musyawarah warga yang selama ini dilaksanakan di balai desa. Hal ini didukung dari pernyataan Bapak Raja (sebutan Kepala Desa) Desa Hunuth yang menyatakan sebagai berikut.

“Balai pertemuan ini bisa selesai pembangunannya selain dari bantuan penguatan juga adanya swadaya masyarakat setempat. Ujudnya tidak sebatas bantuan materi tetapi juga bantuan tenaga karena pengerjaannya murni dilakukan oleh masyarakat sehingga alokasi anggaran untuk upah tenaga kerja bisa dihemat. Lebih terpenting pembangunan balai ini adalah wujud partisipasi masyarakat untuk bergotongroyong dan bekerjasama sehingga dapat membangun nilai keserasian

dan kesetiakawanan sosial masyarakat setempat, kondisi ini secara tidak langsung meminimalisir potensi konflik”.

Pernyataan Kepala Desa Hunuth tersebut menandakan apresiasi yang baik terhadap warganya yang secara sukarela ikut berpartisipasi dalam pembangunan balai pertemuan. Hal ini menyiratkan ada kekompakan dari masyarakat untuk bersatu mengingat persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik. Balai pertemuan ditujukan sebagai tempat bagi warga masyarakat untuk musyawarah mengungkapkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi dan membahas pelaksanaan program. Kegiatan ini diharapkan berbagai permasalahan diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan pertikaian bahkan bentrok. Sebagaimana telah disebut di atas bahwa Ambon frekuensi terjadi konflik sosial cukup banyak, melalui program keserasian sosial berbagai potensi konflik dapat diminimalisir yang didukung peran ketokohan, nilai lokal, dan nilai kebersamaan. Sementara pembangunan tugu keserasian sosial sempat terhambat penyelesaiannya disebabkan lambatnya proses pembuatan prasasti. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa bentuk dan kualitas bahan prasasti dinilai cukup baik menandakan adanya keseriusan forum memberikan yang terbaik terhadap pelaksanaan program keserasian sosial.

Berdasarkan pengamatan dan dukungan wawancara, menunjukkan bahwa bantuan penguatan keserasian sosial yang berfokus pada pembangunan fisik perlu ditinjau ulang dan seyogyanya mengutamakan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan pilar kesejahteraan sosial lokal lainnya sebagai ruh utama program. Alasan yang mendasari bahwasanya jumlah bantuan penguatan keserasian sosial untuk pembangunan fisik tidak mencukupi sehingga dilaksanakan

swadaya masyarakat atau permohonan bantuan dari APBDes/APBD Kota/Kab.

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan tentang eksistensi forum keserasian sosial dalam upaya mencegah konflik sosial di masyarakat di Ambon dapat disimpulkan bahwa keberadaan forum tersebut melalui program yang dilaksanakan ternyata efektif dapat meminimalisir atau mencegah potensi konflik yang diperlihatkan kondisi kemasyarakatan relatif kondusif walaupun belum secara maksimal. Belum maksimal kemungkinan dipengaruhi keterhambatan komunikasi antara penyusun dengan pelaksana program, keterbatasan aksesibilitas sumberdaya pelaksanaan program dan sumber daya lainnya yang turut berpengaruh terhadap keberhasilan program. Dukungan keberadaan kearifan lokal berupa nilai lokal, peran ketokohan, tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat mampu menyumbang keberhasilan pelaksanaan program. Kearifan lokal dan jejaring kemitraan merupakan potensi serta sumber bagi penguatan kohesivitas sosial setempat sebagai alternative pengembangan program keserasian sosial. Sementara bantuan penguatan keserasian sosial terutama yang diperuntukkan pembangunan fisik yaitu balai pertemuan kenyataannya dana yang diperoleh tersebut kurang memadai sehingga untuk mengatasinya dengan menghimpun dana secara swadaya dari masyarakat.

SARAN

Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial agar lebih mendayagunakan kearifan dan budaya lokal serta menjalin kemitraan dengan pihak terkait sebagai potensi serta sumber bagi penguatan kohesivitas sosial dalam mendukung keberhasilan program keserasian sosial. Selain itu dalam rangka mendukung keberhasilan program diharapkan

ada peningkatan intensitas pendampingan, pembinaan, dan monitoring agar eksistensi forum keserasian sosial dapat lebih bermanfaat dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan dalam kegiatan pengumpulan data, kepada pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberi masukan sehingga naskah hasil penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, H. (2015). *Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*. The:Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Unhas Vol.1, No 1 January 2015, 51-59.
- Badan Pusat Statistik tahun 2015.
- Edward III, G.C. (1980). *Implementing Publik Policy*. Washington: Congressional Quarterly
- Koswara,H , Mildawati, M, & Tukino. (2005). *Menyiram Bara Api Konflik*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial, (2016). *Petunjuk Teknis Keserasian Sosial Tahun 2016*. Direktorat perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monografi Kota Ambon tahun 2016.

- Ode, S. (2015). *Budaya Lokal sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku* (Kajian Tantangan dan Revitalisasi Budaya pela). *Politika*, Vol. 6 No. 2 Oktober, 93-100.
- Probosiwi, R, dkk, (2017). *Penguatan Sosial Di Daerah Rawan Konflik (Implementasi Program Keresasian Sosial)*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Rahyono, F. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widayastara.
- Sugiyono.(2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R D*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, A. (2000). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Susan, N. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Yogyakarta: KoPi & Pustaka Pelajar.
- Sumarno, S & Roebiyantho, H. (2013). *Evaluasi Program Keresasian Sosial dalam Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta: P3KS Press.
- Sukardi. (2016). *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 No. 1, 70-89.
- Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Wirutomo, P. (1992). *Pedoman Studi Kualitatif Pemantauan Keresasian Sosial*. Jakarta: Laboratorium Sosiologi Fisip UI.
- Witaradya, K. (2010).. *Implementasi Kebijakan Model C G Edward III*. Diambil kembali dari Kertya Witaradya: Government Consultan: <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward>
<https://id.m.wikipedia.org>>Multikulturalisme diakses tanggal 29 Januari 2019